

SEMIOTIKA ROLAND BARTHES PADA POSTER TEMA “DEMOKRASI” KARYA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 9 SURABAYA

Eva Syafira Aziza

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya
eva.20034@mhs.unesa.ac.id

Mukhzamilah

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya
Mukhzamilah@unesa.ac.id

Abstrak

Poster merupakan media komunikasi yang mengandung berbagai elemen, seperti frasa, klausa, dan gambar yang berpotensi memiliki makna dibalikinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi makna denotasi, makna konotasi, dan mitos atau budaya dari tanda semiotik yang muncul dalam poster tema demokrasi karya siswa kelas VIII SMP Negeri 9 Surabaya. Signifikasi dilakukan dengan cara mendeskripsikan tanda (*sign*) yang muncul dalam poster menggunakan teori semiotika Roland Barthes, yaitu signifikasi denotasi dan konotasi dikorelasikan ke mitos atau budaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif. Data yang digunakan berupa tanda berbentuk frasa, klausa, simbol, dan gambar yang bersumber dari poster karya siswa kelas VIII SMP Negeri 9 Surabaya. Teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, hanya 8 data bertema demokrasi yang dipilih dari 25 total keseluruhan data. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah model alir Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan delapan poster bermakna denotasi demokrasi kenegaraan, lima poster bermakna denotasi demokrasi kemasyarakatan, sembilan poster bermakna denotasi demokrasi pendidikan, tiga poster bermakna denotasi demokrasi keluarga. Makna konotasi yang muncul, yaitu isu yang berimplikasi terhadap kesejahteraan sebuah negara, isu yang berimplikasi terhadap kehidupan bermasyarakat, isu yang berimplikasi terhadap kesejahteraan pendidikan, dan isu yang berimplikasi terhadap sistem keluarga. Mitos atau budaya yang muncul, yaitu berbagai stereotip dan tradisi yang telah menjadi sebuah konvensi di dalam masyarakat Indonesia, seperti stereotip guru, kesetaraan gender, ras, politik, tradisi musyawarah, kerja bakti, dan berbagai budaya negara Indonesia.

Kata Kunci: semiotika, Roland Barthes, poster, demokrasi

Abstract

Posters are communication media that contain various elements, such as phrases, clauses, and images that potentially have meaning behind them. This study aims to explore the denotation meaning, connotation meaning, and myth or culture of semiotic signs that appear in posters on the theme of democracy by students of class VIII SMP Negeri 9 Surabaya. Signification is done by describing the signs that appear in the poster using Roland Barthes' semiotic theory, namely denotation and connotation signification correlated to myth or culture. The type of research used is qualitative-descriptive. The data used are signs in the form of phrases, clauses, symbols, and images sourced from posters by students of class VIII SMP Negeri 9 Surabaya. The data collection technique in this study was purposive sampling, only 8 democracy-themed data were selected from 25 total data. The data analysis technique in this study is the Miles and Huberman flow model, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that eight posters denoted state democracy, five posters denoted community democracy, nine posters denoted educational democracy, and three posters denoted family democracy. The connotation meanings that emerge are issues that have implications for the welfare of a country, issues that have implications for social life, issues that have implications for educational welfare, and issues that have implications for the family system. Myths or cultures that emerge, namely various stereotypes and traditions that have become a convention in Indonesian society, such as stereotypes of teachers, gender equality, race, politics, traditions of deliberation, community service, and various cultures of the Indonesian state.

Keywords: semiotics, Roland Barthes, poster, democracy

PENDAHULUAN

Bidang pendidikan di Indonesia kini telah menjajaki era reformasi yang merupakan eksistensi pemerintahan orde baru pada 1966—1998. Model pemerintahan yang otoriter memegang kendali penuh berbagai bidang. Bidang pendidikan menjadi salah satu korban liciknya berbagai kebijakan orde baru. Terdapat oknum yang sewenang-wenang menjadikan pendidikan sebagai wahana permainan kekuasaan dengan cara menjejalkan doktrin-doktrin tertentu dalam buku ajar. Pengimplementasian kurikulum 1984 dan 1994 menjadi bukti doktrin-doktrin yang manipulatif berkedok buku pembelajaran (Sobri & Umar, 2022).

Masyarakat belum totalitas dalam menjadikan demokrasi sebagai bentuk kesadaran diri dan mentalitas (Sobri & Umar, 2022). Demokrasi terkandung dalam Pancasila yang menjadi pondasi berdirinya Negara Indonesia, otomatis pada setiap aspek dan nilai yang terkandung dalam Pancasila harus digenggam erat sebagai pegangan atau pedoman hidup masyarakatnya. Tiap-tiap yang berharga pasti memiliki nilai dan mutu, serta bermanfaat bagi siapa pun yang menggunakannya (Winarno, dalam Rini, 2017). Ibarat sebuah rumah, percuma saja dasar pondasinya berkualitas, tetapi penghuninya tidak merawat, seiring berjalannya waktu, rumah tersebut akan keropos dan runtuh. Begitu pula sebuah negara, jika rakyatnya tidak mau peduli, niscaya kehancuran akan menanti. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi sebagai upaya sistematis dihadirkan guna menjadi fasilitator dalam penanaman konsep, prinsip, dan nilai-nilai demokrasi kepada warga Indonesia. Bentuk upaya negara dalam memfasilitasi pendidikan demokrasi kini telah berkembang pesat, upaya tersebut dapat dilihat melalui berbagai metode dan bentuk pembelajaran yang dituangkan dalam kurikulum pendidikan.

Kurikulum pendidikan kerap berganti, hel tersebut tentu bukan sebatas tindakan impulsif. Kondisi dan keadaan masyarakat menjadi faktor utama dalam pembentukan kurikulum pendidikan yang berevolusi seiring berjalannya waktu (Mulyasa, 2023). Kurikulum yang kini sedang gencar diaplikasikan di Indonesia adalah Kurikulum Merdeka.

Kurikulum Merdeka merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki kemerosotan kualitas dan kuantitas pendidikan bangsa (Ritonga dkk., 2022). Perbaikan pendidikan karakter merupakan salah satu fokus dalam kurikulum merdeka, hal tersebut selaras dengan pernyataan Nadiem Anwar Makarim bahwa Kemendikburistik merancang strategi yang berfokus untuk menciptakan Pelajar Pancasila sebagai bentuk manifestasi perbaikan pendidikan karakter siswa. (Ismail dkk., 2020). Dibuktikan dengan kegiatan proyek yang

menjadi salah satu bentuk penguatan profil pelajar pancasila (P5) (Faiz dkk., 2022). Proyek tersebut memiliki berbagai tema, salah satunya adalah “Suara Demokrasi”.

Dalam dunia pendidikan, demokrasi menjadi urgensi yang perlu diperhatikan. Eksistensi masyarakat yang totalitas untuk ikut andil dalam mengambil peran, mampu meningkatkan efisiensi pendidikan, pemerataan, mutu, dan capaian demokrasi pendidikan (Sobri & Umar, 2022). Sebagai upaya meningkatkan pendidikan demokrasi, sekolah dapat mengimplementasikan tema “Suara Demokrasi” melalui kegiatan pemilihan ketua dan wakil OSIS. Tanpa disadari, kegiatan tersebut tidak hanya memberikan benefit bagi perkembangan sekolah, tetapi juga dapat menjadi wahana prasarana siswa dalam upaya memberikan pengalaman dalam berkehidupan yang demokratis (Sobri & Umar, 2022).

Menyuarakan pentingnya demokrasi dapat dikomunikasikan melalui berbagai cara. Komunikasi erat kaitannya dengan makhluk hidup. Bagi manusia, komunikasi merupakan hal penting, layaknya oksigen yang bersifat esensial (Pohan & Fitria, 2021). Manusia berkomunikasi secara verbal dan nonverbal dengan lingkungan sosialnya (Suherman, 2020: 2). Dalam menyampaikan sesuatu, penting menentukan media apa yang ingin digunakan dan kepada siapa hal tersebut ingin disampaikan. Memaksimalkan kejelasan dan meminimalisir ambiguitas pesan sangat membantu penerima pesan memahami dan merespon sesuai dengan yang diharapkan. Saat persepsi penerima pesan selaras dengan komunikator, maka komunikasi tersebut dikatakan berhasil dan efektif (Novianti, 2021: 1). Memastikan apakah yang disampaikan dapat dipahami oleh sasaran pembaca (audience) sangatlah penting, terutama jika hal yang ingin disampaikan bersifat memicu polemik dan berpotensi menimbulkan konflik dalam sosial.

Kini, media komunikasi sebagai fasilitator penyebaran informasi telah berkembang pesat dan bervariasi. Sebagai bentuk mempromosikan demokrasi di kalangan siswa, poster menjadi salah satu media komunikasi yang tepat. Poster merupakan media komunikasi visual yang di dalamnya didominasi oleh grafis dengan minimal teks (Shalekhah & Martadi, 2021). Selebar kertas yang didominasi gambar atau grafis tentunya lebih menarik untuk dipandang dibanding selebar kertas yang hanya berisi tulisan atau teks.

poster merupakan salah satu media komunikasi informatif. Meski terlihat sederhana, terdapat berbagai simbol atau lambang yang digunakan di dalamnya sehingga tiap elemen dalam poster memiliki makna yang mendalam (Mustafa, 2021). Hampir semua yang ada di dalam poster mengandung sebuah makna. Sesederhana pemilihan warna, banyak orang yang tidak sadar bahwa

keberadaan warna tersebut bukan hanya sekadar nilai estetika, tetapi juga merupakan bentuk pesan.

Pada dasarnya, poster yang baik adalah yang sederhana dan mampu menyampaikan maksud yang ingin disampaikan, serta mengena di hati pembaca. Poster disebut hilang kegunaannya jika tidak dinamis dan terlalu rumit bagi pembaca untuk mengetahui apa sebenarnya yang ingin disampaikan.

Mengetahui bahwa poster identik dengan grafis, pemilihan gambar, simbol, ikon, dan pewarnaan (*color grading*) sangat berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi yang berlangsung melalui poster tersebut. Akan ada masa dari sisi kreator (komunikator), sulit menentukan simbol atau elemen yang tepat untuk mewakili apa yang ingin disampaikan. Begitu juga dengan pembaca (komunikasi), saat melihat sebuah poster, kemungkinan mereka hanya dapat memahami tanda yang bersifat jelas (*obvious*) dari informasi tersebut. Untuk menghindari berbagai konflik, memahami ilmu pemaknaan sangat penting. Ilmu pemaknaan tersebut dikenal dengan semiotika, sebuah ilmu yang dapat membantu masyarakat dalam memahami makna dalam tanda (Wiflihani, dalam Tamara, 2020).

Semiotika Barthes merupakan teori signifikasi 2 tahap. Tataran pertama berisi makna denotatif dari rantai penanda (objek) dengan tandanya (makna) (Mansoor, 2023). Barthes dalam pendekatannya condong pada mitos dan budaya yang terdapat pada tataran kedua (*second order*) yang berawal dari prinsip konotasi. Mitos merupakan sebuah ideologi-ideologi yang dominan dan sarana yang mendistorsi fakta tanpa ada perlawanan. Hal tersebut lantaran mitos sebagai sejarah yang bertransformasi secara natural dan mengacaukan pembaca atas apa yang dibaca. Pemaknaan Barthes tidak hanya berhenti pada denotasi (makna primer), ia lebih gencar dalam mengembangkan pemaknaan konotasi (makna sekunder) (Pradja, 2014: 185).

Barthes memberikan contoh “gulat” yang dalam makna realitas merupakan jenis olahraga, tetapi Barthes menganggap “gulat” sebagai sebuah tontonan atau hiburan. Lebih lanjut, kata “striptis” mungkin akan dipahami sebagai sesuatu yang seksi, tetapi Barthes menganggapnya sebagai bentuk simbol seksualitas atau gender dari seorang perempuan. Hal tersebut menjelaskan bahwa makna utama tersebut berfungsi menyembunyikan makna sekunder sekaligus menjadi fasilitator dalam penyampaian (Moriarty, 1991: 20). Dalam memaknai sesuatu tidak hanya melihat dari kenyataannya secara natural atau apa yang ada di depan mata, tetapi juga perlu memperhatikan dari segi mitos atau kebudayaan. Melalui semiotika milik Barthes, orang-orang akan sangat terbantu dalam memahami makna atas tanda-tanda secara keseluruhan.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang menjabarkan hasil analisis terhadap data. Penelitian kualitatif memiliki salah satu ciri menggunakan teknik analisis deskriptif (Kusumastuti & Khoiron, 2019: 12). Semiotika dengan menggunakan teori Roland Barthes dipilih sebagai pisau bedah dalam penelitian ini. Tahapan analisis dalam penelitian ini menggunakan model alir Miles dan Huberman.

Sumber data pada penelitian ini adalah poster tema demokrasi karya siswa kelas VIII di SMP Negeri 9 Surabaya. Poster yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 8 buah. Poster dibuat saat sekolah sedang dalam masa kegiatan proyek (P5) yang bertemakan “Suara Demokrasi”. Kegiatan membuat poster ini dilakukan sebagai bentuk ikut andil dalam menyuarakan demokrasi di lingkungan sekolah, khususnya untuk para siswa. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanda (*sign*), seperti frasa, klausa, simbol dan gambar yang terdapat di dalam poster tema demokrasi karya siswa kelas VIII SMP Negeri 9 Surabaya. Tanda (*sign*) tersebut memuat makna denotasi, konotasi, dan mitos atau budaya mengenai demokrasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik baca catat. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara membaca teks atau karya yang menjadi sumber penelitian dan menandai data yang ditemukan dalam poster tema demokrasi karya siswa kelas VIII SMP Negeri 9 Surabaya. Melalui proses pembacaan, dilakukan pencatatan berbagai informasi berdasarkan tujuan penelitian. Dalam hal ini, data yang dicatat berupa frasa, klausa, simbol, ikon, dan gambar.

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian, diperlukan teknik pengambilan data terlebih dahulu. Teknik pengambilan data merupakan cara peneliti untuk mengelompokkan data yang awalnya masih bersifat heterogen menjadi homogen. Salah satu teknik yang dapat digunakan pada penelitian kualitatif adalah teknik *purposive sampling*. Sampel *purposive* memiliki cara kerja mengambil data dengan tujuan tertentu. Pada penelitian ini, hanya dipilih sebanyak 8 data bertema demokrasi dari total 25 data karena hanya 8 data tersebut yang memenuhi kriteria penelitian ini. Data yang awalnya bersifat heterogen, diklasifikasikan dan dipilih berdasarkan kriteria yang cocok bagi peneliti. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Untuk memperoleh data tambahan, digunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Teknik pengumpulan data dokumentasi merupakan data yang diambil dari hasil karya seseorang yang sudah ada, data tersebut dapat berupa gambar maupun tulisan yang berfokus pada sesuatu yang akan

diteliti. Peneliti menggunakan 8 poster hasil karya siswa kelas VIII yang dijadikan fokus pembahasan dalam penelitian ini menggunakan analisis semiotika Roland Barthes.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan terhadap temuan penelitian akan dijawab dan diuraikan berdasarkan hasil analisis sebagai berikut.

Tabel 1.1 Demokrasi Negara

Nomor Data 1	Nomor Data 2
	

1. Denotasi

Makna denotasi poster 1 adalah menyuarakan demokrasi dengan melarang melakukan golput atau dengan sengaja tidak berpartisipasi dalam pemilu. Tulisan “GOLPUT” bermakna golongan putih, yaitu golongan orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Rambu larangan dengan coretan pada gambar atau tulisan merupakan tanda bahwa apapun yang tergambar atau tertulis pada rambu tersebut dilarang untuk dilakukan. Warna merah yang dominan menambah kesan keras terhadap peringatan pada rambu. Warna merah digunakan agar kontras dengan tulisan serta memberikan kesan tegas. Menurut Molly E. Holzschlag, warna merah melambangkan bahaya, kekuatan, agresifitas, dan tenaga.

Makna denotasi poster 2 adalah menyuarakan demokrasi dengan memberikan semangat untuk menggunakan hak suara dalam pemilu. Tulisan “BIARKAN JARIMU BERSUARA” pada poster bermakna denotasi perintah atau ajakan untuk memberikan hak pilih pada kegiatan pemilu. Gambar tangan dengan menjentikkan jari kelingking yang terkena tinta berwarna ungu tua menjadi bentuk persuasif sekaligus contoh tindakan dari maksud poster tersebut. Penggunaan warna merah pada latar belakang poster dipilih karena kontras dengan berbagai elemen lain. Warna merah umum dijumpai pada poster-poster yang berisi motivasi atau perintah agar terkesan tegas dan bersemangat.

2. Konotasi dan Mitos atau Budaya

Golput atau golongan putih merupakan istilah yang kerap digunakan untuk menyebut orang-orang yang dengan sengaja dan sadar menolak ikut serta memberikan suara. Namun, perlu diketahui bahwa munculnya gerakan ini bukan bermula dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Golput digagas oleh kelompok dengan intelektual kritis terhadap kondisi politik yang beracun pada masa orde baru kepemimpinan Soeharto (Indraerawati & Rahmiati, 2021). Golongan putih sebenarnya pertama kali muncul pada 1955, tetapi yang menjadi sorotan adalah saat pemilu 1971. Para pemuda dan mahasiswa pada saat itu merasa kecewa terhadap Partai Golkar karena digadagadag telah berbuat curang dengan melakukan adu domba antar partai dan memanipulasi masyarakat. Disebut putih karena dalam praktiknya, pencoblosan dilakukan pada bagian yang berwarna putih pada surat suara, menghindari warna kuning (Golkar) atau warna partai lainnya. Tindakan tersebut mengakibatkan tidak sahnya suara lantaran posisi yang dicoblos berada di luar kotak yang telah ditentukan.

Memang pada awalnya tindakan golput disebabkan oleh kekecewaan terhadap koalisi berkuasa yang tidak bertanggung jawab, tetapi seiring berjalannya waktu, tindakan golput ini justru dilakukan dengan sengaja dan tanpa alasan. Tindakan tersebut menandakan kemerosotan serta minimnya apresiasi masyarakat terhadap nilai demokrasi. MUI bahkan telah mengeluarkan pernyataan bahwa golput haram hukumnya. Hasil dari rapat MUI dalam rapat Komisi Masail Asasiyah menyatakan bahwa haram hukumnya jika dengan sengaja tidak memberikan hak pilihnya, padahal terdapat kandidat yang memenuhi kriteria (Suharyanti, 2020). Meski begitu, golput menuai pro kontra dan ada yang menganggap bahwa tidak memilih juga merupakan sebuah hak. Namun, perlu diketahui tujuan dari tindakan golput itu sendiri, jika dilakukan dengan sengaja tanpa didasari argumen yang legit, maka sudah pasti menyalahi aturan.

Tindakan golput seiring berjalannya waktu tidak lagi memuat esensi pemikiran kritis politik yang mendasarinya. Oknum-oknum tidak bertanggung jawab melakukan golput tanpa alasan yang jelas dan disengaja.

Peran masyarakat dalam pemilu sangat signifikan memengaruhi legitimasi politik pada suatu negara. Masyarakat yang pasif politik tidak mencerminkan sebagai bagian dari negara demokrasi. Kedaulatan rakyat merupakan salah satu ciri dari negara hukum yang berpedoman asas demokrasi Pancasila (Patricia, L., 2023). Demi kedaulatan rakyat tersebut, pemerintah telah memberikan hak pada tiap-tiap orang untuk memberikan suara atau hak pilihnya dalam pemilu. Oleh karena itu, sebagai bentuk apresiasi warga negara yang demokratis,

sudah semestinya memiliki insting alami untuk ikut ambil peran dalam politik negara.

Mitos yang berkembang di masyarakat adalah kepercayaan terhadap golongan putih yang pasti ada pada setiap pelaksanaan pemilihan umum. Terbukti dengan catatan pada pemilu 2009, suara dimenangkan oleh golongan putih sebanyak hampir 50 juta suara (Suharyanti, 2020). Seiring berjalannya waktu, golongan putih memiliki stereotip negatif di kalangan masyarakat. Hal itu karena dalam gerakan golongan putih, telah hilang esensi pemikiran kritis dan hanya menyisakan euforia atau sikap apatis semata. Jika mendengar kata golput, secara otomatis pemikiran masyarakat akan condong ke arah negatif dengan menganggap golput adalah golongan apatis.

Golongan putih dipandang tidak memiliki empati terhadap keadaan politik di negaranya. Kepercayaan ini membuat rasa cemas terhadap pelaku. Pilih golput dengan sengaja, kemungkinan tidak akan mengumumkan atau mendeklarasikannya karena takut akan pandangan masyarakat. Golongan putih telah ada sejak lama (1955), menjadi kontroversial pada 1971, lalu membludak pada pemilu 2009 (29,1% golput) dan 2004 (30,42% golput). Bahkan hingga saat ini golongan putih masih ada dalam pemilihan umum. Hal itu menjadi sebuah konvensi atau stereotip yang melekat di dalam masyarakat. Terdapat banyak alasan atau faktor seseorang melakukan golput. Berdasarkan dua pendekatan, yaitu (1) psikologi dan karakter sosial pemilih dengan model institusional pemilu dan (2) lalu pendekatan keuntungan dan kerugian yang dipertimbangkan oleh orang tersebut saat datang ke pemilu atau tidak (Akbar, 2020). Dua pendekatan tersebut secara umum menjelaskan bahwa faktor kepribadian dapat menjadi penyebab golput. Orang dengan kepribadian acuh tak acuh atau apatis akan cenderung malas berpartisipasi dalam politik. Diperlukan stimulasi atau sosialisasi lebih terhadap golongan orang seperti itu. Sistem pemilu juga berpengaruh terhadap jumlah partisipan, sistem pemilu yang proporsional lebih diminati dibanding sistem politik distrik. Alasan terakhir adalah kepercayaan politik, terdapat dua makna, antara orang tersebut sudah tidak percaya dengan politik atau justru karena telah merasa puas terhadap politik yang ada.

Budaya yang berkembang di masyarakat adalah tradisi mencelupkan jari keliling ke dalam tinta setelah memberikan suara dalam pemilu. Jari keliling yang telah tercelup tinta menandakan orang tersebut sudah memberikan suaranya dalam pemilu. Budaya mencelupkan jari keliling ke tinta berwarna biru atau ungu tua telah menjadi konvensi di Indonesia. Semua jari maupun salah satu bagian yang dicelupkan ke tinta sebetulnya sah-sah saja, tetapi di Indonesia sudah terbiasa menggunakan jari keliling. Gerakan ini sebenarnya berasal dari India yang diakibatkan oleh kecurangan dalam

pemilu, lalu mereka mensiasatinya dengan mencelupkan jari peserta pada tinta sebagai bentuk tanda telah memilih. Setelah itu, negara-negara lain mulai meniru cara tersebut, termasuk Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu beberapa negara mulai meninggalkan cara tersebut, contohnya mengganti tinta dengan stiker yang ditempel di baju hingga cara canggih seperti cek sidik jari dan validasi KTP. Indonesia menjadi salah satu negara yang masih menggunakan cara India hingga saat ini. Kembali pada pesan yang ingin disampaikan dalam poster tersebut bahwa keberadaan pemilih suara adalah hal yang berharga (*precious*) untuk sebuah negara demokrasi. Berkat partisipasi dalam pemilu, berbagai kebijakan publik dan pemimpin yang ada bersumber dari aspirasi (iswardhana dkk., 2023). Dari kebijakan yang diterbitkan oleh pihak berwenang yang telah terpilih, berimplikasi terhadap perbaikan berbagai masalah sosial di suatu negara.

Tabel 1.2 Demokrasi Masyarakat

Nomor Data 3	Nomor Data 4
	

1. Denotasi

Poster 3 bermakna denotasi menyuarakan demokrasi melalui kegiatan menghias gapura menjelang hari kemerdekaan Indonesia. Terdapat tulisan “DEMOKRASI ITU RUKUN”, pada latar belakang terlihat digambarkan sebuah pemukiman atau perkampungan, ditandai dengan gambar rumah-rumah. Lalu terdapat gapura yang sedang dihias oleh warga. Terlihat warga laki-laki sedang sibuk bekerja bakti dan warga perempuan yang menawarkan minuman. Semua tanda tersebut menjelaskan bahwa poster mengangkat tema kerukunan dalam bekerja bakti menghias gapura.

Makna denotasi poster 4 adalah menyuarakan demokrasi melalui kegiatan musyawarah bersama warga di lingkungan tempat tinggal. Tanda tersebut adalah tulisan “MUSYAWARAH MUFARAT”, terlihat latar pemukiman atau perkampungan yang ditandai dengan gambar rumah-rumah. Tampak beberapa warga yang sedang berkumpul di sebuah teras pendopo memperlihatkan kegiatan diskusi atau musyawarah. Berbagai peralatan seperti laptop, alat tulis, dan buku catatan semakin memperjelas kegiatan diskusi atau musyawarah yang dilakukan warga. Semua tanda tersebut

menjelaskan bahwa poster mengangkat tema musyawarah mufakat.

1. Konotasi dan Mitos atau Budaya

Dalam berkehidupan di masyarakat, memahami nilai-nilai demokrasi adalah hal yang wajib. Dampak dari cara bersosial yang demokrasi salah satunya adalah kerukunan. Kerukunan tercipta dari kegiatan gotong royong dan saling bahu-membahu dalam menyelesaikan keinginan bersama, dalam kasus ini adalah gotong royong menghias gapura. Kegiatan gotong royong dapat disebut kerja bakti, yaitu pekerjaan yang dilakukan tanpa mengharap atau diberi upah. Kerja bakti merupakan salah satu wujud implementasi nilai demokrasi karena dalam prosesnya akan menghasilkan rasa persatuan dan kesatuan antar individunya.

Nilai demokrasi juga akan terasa karena semua pihak tidak ada yang merasa berat sebelah sebab semua dikerjakan bersama-sama. Kegiatan kerja bakti menciptakan keadilan dan memperjelas hak serta kewajiban. Hal itu karena dalam mata demokrasi, tidak ada keistimewaan faktor ekonomi, suku, agama atau gender. Terlihat pada poster bahwa seluruh warga mendapatkan tugas masing-masing, tanpa memandang perbedaan gender. Semua dipandang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Begitu juga dengan kegiatan kerja bakti, semua orang ikut andil dan berpartisipasi dalam mencapai keinginan bersama.

Terdapat dua budaya yang muncul pada poster. **Budaya pertama**, menghias gapura dalam menyambut hari kemerdekaan sudah menjadi kebiasaan di Indonesia. Kegiatan tersebut biasanya dapat dijumpai di pemukiman atau perkampungan yang memiliki gerbang depan (gapura). Kegiatan menghias gapura dalam menyambut hari kemerdekaan setiap 17 Agustus merupakan sebuah tradisi yang masih berjalan hingga sekarang. HUT RI tiap tahunnya akan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, menghias gapura menggunakan berbagai ornamen menjadi salah satu hal wajib (Fatmawati & Hakim, 2023). Kegiatan menghias gapura sudah menjadi tradisi di Indonesia dari tahun ke tahun semenjak masa orde baru. Pada masa orde baru, pembangunan gapura menjadi kewajiban di setiap daerah. Kegiatan tersebut melambangkan semangat masyarakat Indonesia menyambut kemerdekaan dengan bergotong-royong demi mencapai keinginan bersama. Selain itu, berdirinya sebuah gapura juga melambangkan Indonesia yang telah mampu berdiri di atas kaki sendiri. Oleh karena itu, sebagai wujud menghargai sekaligus ikut memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan menghias gapura menjadi elemen penting dalam masyarakat. Terdapat ciri khas atau hal yang identik dengan kegiatan kerja bakti, biasanya warga laki-laki yang bertugas untuk

menghias gapura. Ukuran gapura yang besar dan tinggi, memerlukan penggunaan tangga dalam pengerjaannya. Orang dengan ukuran tubuh yang tinggi dirasa mampu mengerjakan pembangunan tersebut, oleh sebab itu dilakukan oleh warga laki-laki. Lain halnya dengan warga perempuan bertugas untuk menyediakan konsumsi, seperti minuman dan gorengan. Hiasan yang biasa digunakan untuk mendekorasi gapura adalah bendera merah putih sebagai lambang negara, lalu dapat ditambahkan berbagai ornamen lain sesuai kreativitas. Dari kegiatan tersebut, rasa kebersamaan, empati, dan nasionalisme dapat tercipta.

Budaya kedua, musyawarah yang telah menjadi tradisi turun-temurun dan masih dilakukan hingga detik ini. Berasal dari bahasa Arab “*syawara*”, musyawarah diartikan sebagai berunding, diskusi, dan rembukan untuk mencapai sebuah kesepakatan. Musyawarah telah dilakukan sejak lama, keberadaannya berjasa dalam mengukir sejarah perjalanan Negara Indonesia. Para pemimpin dan ulama zaman dulu telah menerapkan musyawarah dalam mengatur pemerintahan. Dibuktikan oleh cara wali atau ulama menjalankan roda pemerintahan Demak yang tertulis dan teks-teks Nusantara. Contoh kutipannya adalah “*Para Wali kemudian duduk dengan teratur, adalah Syekh Maulana Maghribi yang memimpin musawaratan Syekh Majagung dan Syekh Domba terus mencatat dengan cermat segenap isi perdebatan hingga tamat*” dalam Serat Jaka Rusul. Kutipan tersebut selaras dengan praktik musyawarah yang berjalan hingga kini. Musyawarah umumnya dilakukan dengan posisi duduk, bertujuan agar peserta merasa nyaman karena musyawarah memerlukan waktu yang tidak sebentar. Dalam musyawarah pasti ada yang bertugas menjadi perantara, menyiapkan materi, dan mencatat segala hal selama prosesnya. Musyawarah identik dilakukan pada malam hari sebab malam hari adalah waktu sebagean besar orang berhenti beraktivitas sehingga besar kemungkinan untuk ikut berpartisipasi. Suasana malam yang tenang dan sejuk juga dapat menunjang keberlangsungan musyawarah.

Terdapat berbagai suku dan golongan yang menjadikan musyawarah sebuah tradisi wajib. Matahir merupakan musyawarah yang menjadi tradisi suku Mandailing saat akan mengadakan suatu acara (Nasution & Dora, 2023). Suku Sasak melakukan tradisi patus yang merupakan bentuk kesepakatan saling tolong-menolong antar masyarakat saat mengadakan kegiatan (Alghifari dkk., 2022).

Tabel 1.3 Demokrasi Pendidikan

Nomor Data 5	Nomor Data 6
	

1. Denotasi

Poster nomor 5 bermakna denotasi menyuarakan demokrasi dengan mengancam tindakan *bullying* dalam dunia pendidikan. Tulisan “BERANTAS BULLYING DALAM LINGKUP PENDIDIKAN” bermaksud mengajak untuk tidak melakukan perundungan dalam lingkungan pendidikan. *Bullying* adalah bahasa asing yang bermakna perundungan, yakni tindakan-tindakan mendiskriminasi, mengintimidasi, atau kekerasan terhadap seseorang yang dapat berdampak pada kesehatan fisik dan psikologis. Pelaku perundungan biasanya lebih dari satu orang, sedangkan korban biasanya bersifat individualis. Hal tersebut tergambar jelas pada poster, terdapat pelaku yang digambarkan lebih dari satu orang (menggambarkan pihak yang lebih kuat) sedang melakukan perundungan terhadap korban yang hanya seorang diri. Tulisan “STOP” yang berarti berhenti, serta penanda rambu larangan yang bermakna larangan terhadap sesuatu, menjelaskan bahwa pembaca diminta untuk menghindari atau berhenti melakukan sesuatu.

Makna denotasi poster 6 adalah menyuarakan demokrasi dengan mengedukasi mengenai pentingnya menghormati guru. Tulisan “HORMATI GURUMU” pada poster bermakna perintah untuk menghormati guru. Gambar siswa sedang mencium tangan menjadi salah satu contoh sikap menghormati guru. Keberadaan gambar orang tua siswa yang bersikap sopan terhadap guru juga menjadi bukti bahwa guru wajib dihormati. Latar gedung sekolah bermakna tempat guru mendedikasikan diri untuk memberikan ilmunya.

2. Konotasi dan Mitos atau Budaya

Pendidikan belum sepenuhnya berjalan secara demokratis karena masih ada pihak-pihak yang tidak mendapatkan keadilan saat berada di dalamnya. Hadirnya perundungan dalam lingkup pendidikan jelas menimbulkan pertanyaan dan dirasa tidak tepat. Seorang anak yang seharusnya bisa berkembang dan menjadi lebih baik, malah mengalami kemunduran terhadap potensinya akibat *bullying*. Sekolah sudah seharusnya menjadi lingkungan yang bebas dari hal negatif karena sekolah

adalah tempat untuk mempelajari berbagai hal, mulai dari ilmu pengetahuan, ilmu kehidupan, hingga ilmu spritual (Mutiasari & Yarni, 2023). Seperti yang telah dibahas pada poster nomor data 12, siswa memiliki hak penuh terhadap rasa aman dan nyaman melalui pendidikan yang demokratis, yakni pendidikan yang di dalamnya menjunjung tinggi keadilan. Menciptakan dunia pendidikan yang bebas dari kekerasan adalah hal yang penting bagi keberlangsungan hidup siswa. Berawal dari sekolah, perundungan dapat memengaruhi kehidupan korban di luar lingkungan sekolah.

Pelaku perundungan biasanya menyepelekan hal-hal kecil yang dilakukannya, selama korban tidak terluka atau menangis, pelaku menganggap tindakan tersebut bukanlah hal yang serius. Padahal, terdapat banyak tindakan yang termasuk dalam perilaku pembulian, mulai dari cara kasar hingga halus. Cara kasar biasanya menimbulkan luka fisik pada korban, sedangkan cara halus biasanya menyerang psikologis atau mental. Tindakan perundungan (*bullying*) memiliki beberapa jenis, yakni *bullying* dengan menyerang fisik, menyerang verbal (verbal), lewat internet (*cyber bully*) dan relasional (hubungan sosial). Perundungan dengan cara melukai fisik (memukul) adalah cara *bullying* yang paling jelas karena pelaku biasanya tidak dapat melakukannya dengan keadaan tenang dan berakhir menimbulkan bekas yang dapat dilihat dengan mata telanjang (berdarah, lebam, dan bengkak). Lalu perundungan secara verbal biasanya menjadi perundungan yang tidak disadari dan diketahui oleh pihak selain pelaku dan korban. Bahkan, pelaku sendiri bisa tidak menyadari jika telah melakukan tindakan perundungan. Hal tersebut disebabkan karena *bullying* dilakukan dengan mengeluarkan kata-kata lewat mulut. Di dunia ini terdapat berbagai jenis kalimat, mulai dari yang halus, terselubung, sarkas, hingga frontal. Kalimat-kalimat negatif yang dilontarkan oleh pelaku terhadap korban hanya akan lewat begitu saja dan tidak menimbulkan bekas yang dapat dilihat dengan mata karena yang terserang adalah mental atau psikologis korban. Selanjutnya, *cyber bully* atau perundungan lewat dunia maya (internet) merupakan tindakan merundung melalui berbagai aplikasi dengan cara mengirimkan pesan, komentar, atau konten negatif yang mengintimidasi korban. Jenis *bully* yang terakhir adalah perundungan relasional, yakni dilakukan dengan menarik lingkungan sosial menjauh dari korban. Dalam situasi tersebut, pelaku akan membuat korban terkucilkan dalam sosial.

Penjelasan di atas menjadi bukti bahwa perundungan itu sangat luas dan beragam caranya. Pembulian merupakan hal yang tidak bisa disepelekan karena dapat berdampak secara berkelanjutan terhadap korban (Wulandari & Ningsih, 2023). Keberadaan perundungan di dalam dunia pendidikan adalah masalah sosial yang

krusial karena tidak mencerminkan pendidikan yang demokratis.

Tidak hanya siswa, tenaga pendidik juga bisa menjadi korban pendidikan yang tidak demokratis. Guru atau tenaga pendidik memiliki sebutan pahlawan tanpa tanda jasa. Tidak semua orang mampu menjadi seorang guru. Bukan tanpa alasan, menjadi seorang guru berarti harus menjadi orang tua bagi anak orang lain. Dedikasi seorang guru terhadap siswanya hampir sama dengan saat mengurus anak kandungnya sendiri di rumah. Disamping harus mengajarkan ilmu pengetahuan, seorang guru juga harus memberikan pendidikan karakter dan spiritual. Hak guru untuk dihormati tercantum dalam pendidikan yang demokratis. Tidak hanya siswa, guru juga memiliki hak untuk merasa nyaman dan aman saat menjalani profesinya di sekolah.

Menghormati guru merupakan salah satu sikap demokratis karena menandakan individu tersebut memahami nilai-nilai dalam berkehidupan yang terkandung dalam Pancasila. Hormat terhadap guru adalah hal dasar dan merupakan secuil bagian dari begitu banyak nilai-nilai karakter (Yulizha dkk., 2023). Penanaman moralitas pada siswa melalui pendidikan karakter merupakan alternatif yang dapat ditempuh untuk menempa sikap demokratis, dalam kasus ini adalah menghormati guru. Menciptakan lingkungan yang beretika dapat dimulai dari guru, menjadi tenaga pendidik bukan berarti bersikap kaku atau formal. Seorang guru sebisa mungkin juga ikut merangkul siswa dan memperlakukan siswa dengan baik. Orang tua juga memiliki andil besar dalam terbentuknya karakter anak karena pendidikan pertama dan yang paling lama dijalani adalah pendidikan yang didapat dari orang tua. Lalu, lingkungan anak juga berdampak terhadap cara pandang anak yang masih labil dan rentan dipengaruhi oleh hal-hal negatif. Namun, itu semua kembali lagi pada diri anak itu sendiri. Siswa yang telah mendapatkan berbagai ilmu sekaligus merasakan peran orang tua di sekolah dari seorang guru seharusnya memiliki rasa terima kasih dan membalas budi dengan sikap yang bermoral.

Mitos yang berkembang di dalam masyarakat mengenai *bullying* adalah kepercayaan terhadap fenomena pembulian yang pasti ada pada tiap instansi pendidikan. Masyarakat percaya, paling tidak ada satu kasus perundungan di setiap sekolah, baik yang diketahui ataupun tidak. Banyaknya pemberitaan mengenai perundungan bukan tanpa alasan melainkan korban yang buka suara hingga munculnya saksi-saksi atas tindakan perundungan. Hal tersebut menimbulkan sebuah stereotip di masyarakat. Masyarakat tidak lagi merasa terkejut jika terdapat kasus perundungan dalam dunia pendidikan karena memang ada banyak sekali fenomena *bullying* yang terjadi. Tindakan perundungan dapat merubah pola hidup

siswa di sekolah. Siswa yang menjadi korban perundungan akan trauma untuk belajar karena harus pergi ke sekolah yang menjadi sumber traumanya. Padahal, perlu diketahui bahwa pendidikan berperan besar terhadap masa depan anak. Masyarakat percaya bahwa semakin seseorang banyak menggunakan waktunya untuk mengenyam pendidikan, semakin besar pula jaminan kesuksesan yang didapat kelak. Lamanya durasi pendidikan yang ditempuh, partisipasi, dan kehadiran di sekolah dapat berpengaruh besar terhadap kehidupan anak yang berimplikasi pada jaminan kualitas hidup dan karir yang stabil di masa depan (Nimasari dkk., 2024). Menjadi negara demokrasi, diperlukan upaya untuk menghilangkan stereotip tersebut dalam lingkup pendidikan. Guru dapat menjadi partisipan dalam pencegahan perundungan, yakni dengan menjadi panutan yang baik. Sekolah juga dapat mengadakan sosialisasi atau penyuluhan terkait *bullying* serta menyediakan wadah untuk menampung siswa yang merasa menjadi korban. Siswa juga dapat berpartisipasi dalam mencegah perundungan, yakni dengan menerapkan sikap saling menghargai dan kekeluargaan dengan sesama.

Mitos yang ada pada poster nomor data 6 adalah kepercayaan bahwa guru adalah profesi yang disepelekan atau dipandang sebelah mata. Hal tersebut dapat dilihat saat generasi muda diberi pertanyaan tentang cita-cita, jarang sekali menyebutkan profesi guru. Para siswa lebih tertarik dengan profesi yang dianggap memiliki popularitas di kalangan masyarakat dan upahnya yang relatif besar (dokter, tentara, polisi, dan pilot). Jika dilihat secara realistis memang tidak ada yang salah dengan pendapat tersebut, tetapi yang menjadi masalah adalah akhirnya muncul stereotip yang melekat pada profesi guru. Stereotip di masyarakat adalah profesi guru dianggap memiliki gaji yang kecil dan tidak terpandang. Belum lagi berlakunya Kurikulum Merdeka yang tidak memperbolehkan guru memarahi siswa. Posisi guru menjadi disepelekan dan diinjak-injak. Fakta di lapangan menyebutkan kerap kali dijumpai sikap siswa yang tidak beradab terhadap guru. Peneliti sebagai mahasiswa pendidikan yang telah merasakan pengalaman mengajar di sekolah juga melihat sendiri sikap siswa yang tidak bisa menghormati dan menghargai guru. Kasus siswa yang kurang ajar hingga menganiaya guru juga kerap kali muncul. Seperti, terdapat kasus yang sempat menggemparkan dan viral di media sosial mengenai seorang guru yang mendapatkan perlakuan tidak baik dari siswanya. Kasus tersebut dilansir pada 10 Februari 2019 dan terjadi di sekolah SMP yang ada di Gresik. Guru tersebut mendapatkan kekerasan verbal dan nonverbal dari anak didiknya sendiri karena menegurnya saat ketahuan merokok. Lebih miris lagi, siswa lainnya bukannya menghentikan, tetapi malah menonton dan menertawakan tindakan siswa terhadap guru tersebut.

Masalah sosial ini sangat menyayat hati, melihat guru sebagai tenaga pendidik yang seharusnya dihormati karena memiliki ilmu dan turut berkontribusi terhadap masa depan orang banyak, nyatanya menjadi bahan lelucon bagi anak didiknya sendiri. Oleh karena itu, sangat penting mempelajari nilai-nilai demokrasi yang di dalamnya berisi berbagai aturan dalam berkehidupan. Jangan sampai menodai identitas bangsa dengan cara tidak menghormati guru.

Tabel 1.4 Demokrasi keluarga

Nomor Data 7	Nomor Data 8
	

1. Denotasi

Makna denotasi poster 7 adalah menyuarakan demokrasi dengan saling membantu dalam urusan rumah tangga. Tulisan “DEMOKRASI ITU RINGAN” bermakna bahwa dengan menerapkan demokrasi, dapat menjadikan sesuatu lebih ringan. Dalam hal ini adalah demokrasi yang diterapkan di dalam keluarga. Dalam sebuah keluarga biasanya terdapat suami, istri, dan anak. Pada poster telah tergambarkan situasi di dalam rumah dengan masing-masing anggota keluarga yang sedang melakukan aktivitas atau tugas masing-masing. Suami sedang memasak dan menggendong anak perempuan, istri sedang mengganti popok bayi, dan anak laki-laki sedang menyapu, memperlihatkan sebuah kerja sama dalam keluarga. Poster memperlihatkan keharmonisan sebuah keluarga yang menerapkan demokrasi di dalamnya.

Makna denotasi poster 8 adalah menyuarakan demokrasi dengan mengancam tindakan kekerasan pada anak di dalam keluarga. Tulisan “STOP!!! KEKERASAN PADA ANAK” mengartikan bahwa poster tersebut mengangkat isu kekerasan anak. Poster tersebut melarang keras tindakan kekerasan terhadap anak. Pada poster tergambar seorang ibu yang sedang memarahi anaknya dengan intonasi yang tinggi (membentak), seorang kakak yang memukul adiknya yang telah merusak gawai (gambar gawai yang retak), dan ayah yang memarahi anaknya dengan keras karena menjatuhkan telur (gambar telur yang pecah).

2. Konotasi dan Mitos atau Budaya

keluarga yang di dalamnya menerapkan toleransi dan bekerja sama akan menjadikan segalanya ringan. Kerja sama dalam hal ini adalah kerja sama dalam melakukan berbagai pekerjaan yang berurusan dengan rumah dan keluarga. Pada konsepnya, keluarga adalah struktur, interaksi, dan fungsi (Gracia dkk., 2021). Keluarga jika diibaratkan sebuah bangunan, suami atau ayah akan menjadi atap, istri atau ibu akan menjadi tembok, dan anak menjadi perabotan. Semua komponen tersebut saling melengkapi, Sebuah keluarga harus menciptakan interaksi agar setiap anggotanya terbuka dalam menyampaikan sesuatu. Menyampaikan berbagai hal yang bertujuan untuk keberlangsungan semua anggota keluarga dapat menjadikan lingkungan keluarga yang demokratis. Selain menyampaikan pendapat, keluarga juga harus saling memahami perannya masing-masing.

Penjelasan di atas tidak terlepas dari pemahaman tentang kesetaraan gender di dalam keluarga. Kesetaraan gender memiliki andil besar dalam menciptakan keluarga yang demokratis. Memahami bahwa perempuan juga memiliki hak dan laki-laki juga memiliki kewajiban adalah hal yang penting. Laki-laki juga boleh memasak, laki-laki juga boleh membersihkan rumah, dan istri berhak diberi bantuan. Kesetaraan gender memberikan dampak yang signifikan terhadap sebuah keluarga. Beberapa dampak tersebut adalah rasa adil yang dirasakan anak karena orang tuanya berlaku adil dan orang tua mendapatkan ketenangan batin karena semua anggota keluarga tidak ada yang merasa berat sebelah. Penerapan kesetaraan gender juga tidak terlepas dari pendidikan agama, mengetahui bahwa perempuan juga berdaya juga tidak membenarkan jika sampai menyalahi dan melupakan kodratnya sebagai perempuan.

Konflik atau isu kesetaraan gender nyatanya tidak hanya dialami oleh orang dewasa, anak-anak juga terkena imbasnya. Contohnya kesetaraan gender dalam membesarkan anak. Kesetaraan gender dilakukan untuk mendobrak batasan-batasan antar laki-laki dan perempuan. Tanda adanya kesetaraan gender adalah baik laki-laki maupun perempuan telah mencapai kenyamanan dalam berkehidupan (Wibowo dkk., 2022). Semua pihak dapat dengan bebas mencicipi dan menjalani hal yang sama tanpa dibatasi oleh jenis kelamin yang berasal dari pengaruh sosial sejak zaman dulu.

Konflik kesetaraan gender tidak hanya dirasakan oleh orang dewasa, anak-anak juga dapat mengalaminya. Meskipun belum mengerti dan menyadarinya. Orang tua memiliki peranan penting dalam mempraktikkan kesetaraan gender dalam proses mendidik dan membesarkan anak. Pada poster terlihat seorang ibu yang sedang memasak bersama anak laki-lakinya. Sedikit banyak, fenomena tersebut pasti menggelitik hati

pembaca. Hal tersebut diakibatkan pemahaman kuno yang melekat kuat pada masyarakat terhadap laki-laki. Kegiatan masak-memasak dianggap sesuatu yang *kemayu* dan tidak cocok dengan *image* laki-laki yang identik dengan kejantanan. Begitu juga dengan gambar seorang ayah yang sedang mereparasi sepeda bersama anak perempuannya. Kegiatan tersebut biasanya melelahkan, membuat berkeringat, dan kotor. Dalam pandangan masyarakat, perempuan dianggap tidak cocok melakukannya, perempuan memiliki *image* yang lembut, bersih, dan anggun.

Fenomena kesetaraan gender pada anak dapat menimbulkan perang fisik dan batin. Anak yang merasa terbelenggu oleh batasan yang dibuat oleh orang tua akan menimbulkan rasa iri antara anak laki-laki dan perempuan. Kedua pihak sama-sama merasakan berat sebelah dalam aspek yang berbeda. Penerapan kesetaraan gender tetap harus diimbangi pendidikan agama guna memberikan batas-batas yang memang mutlak tidak boleh dilewati oleh laki-laki dan perempuan (kodrat).

Sejatinya orang tua menjadi sumber pertama anak belajar dan tidak ada batas waktunya. Dari orang tua, anak dapat mempelajari berbagai ilmu atau kemampuan (*skill*) untuk bekal berkehidupan. Jika dalam membesarkan anak tidak dibarengi dengan pemahaman kesetaraan gender, orang lain dapat menjadi korban anak tersebut karena perlakuan tidak demokratis orang tuanya semasa ia kecil.

Tidak semua keluarga memahami pentingnya memberikan perlindungan terhadap anak. Ada beberapa anak yang tidak mendapat keberuntungan tumbuh dalam keluarga yang berfungsi dan berjalan dengan demokratis. Fenomena ini dapat disebut dengan disfungsi keluarga, seperti namanya "disfungsi" yang berarti tidak sesuai dengan fungsi semestinya. Disfungsi keluarga ditandai dengan tidak ada rasa empati satu sama lain dan menerapkan kekerasan sebagai pola pengasuhan (Gracia dkk., 2021). Keluarga yang seharusnya berfungsi sebagai tempat berlindung, nyatanya menjadi sumber utama berbagai luka fisik dan mental bagi anak. Tidak diterapkannya nilai demokrasi dalam keluarga merupakan penyebab hilangnya fungsi normal keluarga.

Kekerasan adalah dampak dari disfungsi keluarga, menyelesaikan dan merespon masalah menggunakan jalan kekerasan adalah ciri keluarga yang tidak demokratis. Keluarga dengan pola asuh seperti itu biasanya tidak memiliki kualitas komunikasi yang baik (*lack of communication*) antar anggota. Tidak ada komunikasi yang sehat dan tersedianya sesi diskusi, memupuk perangai kasar dan apatis karena terbiasa memendam semuanya sendiri. Jika marah akan langsung mengonfrontasi dengan nada tinggi atau memukul tanpa mau berbicara baik-baik terlebih dahulu. Faktor ekonomi juga menjadi alasan terbesar terjadinya kekerasan. Anak

dijadikan korban atas rasa frustrasi orang tua karena perekonomian keluarga yang buruk.

Anak yang menjadi korban kekerasan cenderung sulit percaya dengan orang lain (*trust issues*). Anak tersebut akan terus merasa skeptis saat ingin didekati orang lain. Bukan tanpa alasan, keluarga sebagai orang terdekatnya, nyatanya dapat melukai terlebih lagi orang yang bukan keluarganya. Anak juga bisa menjadi pribadi yang tertutup dan tidak percaya diri. Hal tersebut disebabkan karena semasa hidupnya tidak pernah diberikan kesempatan untuk berbicara dan mengutarakan opini. Dampak yang paling parah adalah harus mendapat tindakan medis karena gangguan psikologis atau hingga berujung kematian.

Kepercayaan terhadap isu kesetaraan gender pada perempuan masih merajalela. Stereotip yang melekat dan membandel pada diri perempuan telah menjadi sebuah konvensi di masyarakat. Kesetaraan gender bukan sebatas perbedaan jenis kelamin, melainkan karakteristik antara jantan dan betina yang dapat saling dialihkan. Perempuan bersifat feminim, lembut, lemah, dan sabar. Berbanding terbalik dengan laki-laki yang identik dengan maskulinitas. Pada intinya, gender bukanlah sebuah kodrat dari Tuhan mengenai jenis kelamin seseorang, melainkan sebuah behavioral differences atau perbedaan perilaku laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh masyarakat (*socially constuct*).

Masyarakat menjadi cikal bakal dan memiliki andil besar terhadap munculnya isu kesetaraan gender. Akibat dari budaya membedakan tugas laki-laki dan perempuan, pada akhirnya menciptakan stereotip yang merugikan pihak perempuan. Konsep perempuan yang hanya dilibatkan dalam urusan reproduksi dan domestik sudah berjalan bertahun-tahun. Konsep tersebut menjadikan perempuan dipandang rendah dan dibatasi dalam mengembangkan potensi diri. Masih terdapat daerah yang melakukan diskriminasi gender dengan melarang perempuan mengenyam pendidikan (Noviani, 2022). Lebih miris lagi, tidak hanya pendidikan yang dibatasi, perempuan juga mendapatkan kekerasan salah satunya diakibatkan kesenjangan gender. Kasus kekerasan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan menunjukkan persentase kekerasan terhadap perempuan yang lebih mendominasi. Tercatat sebanyak 79,6% kekerasan terhadap perempuan terhitung hingga tahun 2021 bahkan tetap konsisten memimpin hingga tahun 2024. Tercatat mulai 1 Januari 2024, korban kasus kekerasan sebanyak 6.845 (perempuan) dan 1.715 (laki-laki). Data tersebut semakin memperkuat bahwa stereotip terhadap perempuan sulit untuk dihapuskan karena telah ada bertahun-tahun lalu dan menjadi budaya.

Konflik mengenai kesetaraan gender nyatanya berdampak ke berbagai lingkup kehidupan, salah satunya pada konsep keluarga. Kesetaraan gender pada dasarnya merupakan upaya untuk menciptakan keadilan terhadap hak laki-laki dan perempuan. Masyarakat sering membedakan tugas suami (laki-laki) dan tugas istri (perempuan). Segala pekerjaan yang berhubungan dengan

rumah, seperti membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak dianggap menjadi kewajiban paten seorang istri. Padahal, menjadi seorang istri bukanlah hal yang mudah, istri yang menjadi ibu rumah tangga dianggap berleha-leha karena hanya berada di rumah. Nyatanya, banyak sekali hal yang harus diselesaikan oleh istri sendirian. Hal yang perlu diketahui adalah suami juga memiliki kewajiban untuk membantu istri dalam urusan rumah tangga. Sebuah rumah yang penghuninya tidak memiliki rasa kepedulian terhadap satu sama lain, tidak layak dijadikan tempat membangun sebuah keluarga. Keluarga yang tidak menjunjung demokrasi kesetaraan gender akan membuat rumah seperti neraka seiring berjalannya waktu. Hal tersebut disebabkan karena keluarga akan dijauhkan dari rasa damai, rukun, dan gembira. Istri meluapkan amarahnya karena merasa kewalahan, suami yang tidak mau memahami, dan anak yang menjadi acuh tak acuh karena kedua orang tuanya tidak pernah memperlihatkan rasa toleransi atau kepedulian. Pemahaman demokrasi dalam keluarga berdampak besar terhadap cara setiap anggota keluarga menjalani kehidupan, baik di dalam rumah maupun di luar rumah.

Budaya di masyarakat adalah mengenai pola asuh otoriter yang digunakan oleh orang tua. Pola asuh semacam itu bukan hal yang mengagetkan, orang tua zaman dahulu terbiasa dengan pola pengasuhan yang kasar terhadap anak. Bahkan hingga saat ini, masih ada orang tua yang mengaku setuju dengan pola asuh yang melibatkan kekerasan di dalamnya. Orang tua tersebut beranggapan bahwa kekerasan menjadi solusi atau jalan keluar atas kesalahan yang anak perbuat. Memukul, berteriak, dan mengancam dianggap efektif untuk memberikan rasa jera kepada anak.

Popularitas didikan semacam itu dibuktikan dengan istilah “didikan VOC” yang baru-baru ini muncul di internet. Sebutan itu memiliki arti cara didik yang tidak berperikemanusiaan, layaknya penindasan terhadap pribumi oleh Belanda pada zaman dahulu. Bahkan kepercayaan terhadap cara asuh ini sudah mencapai taraf internasional. Dapat dengan mudah ditemukan berbagai komentar orang asing seperti “hanya orang tua asia”, “tipe didikan asia”, “orang tuaku tidak pernah seperti itu”, dan masih banyak lagi pada konten yang berhubungan dengan cara didik. Orang tua asia memiliki stereotip pola pengasuhan yang cenderung keras. Akan tetapi, stereotip tersebut nyatanya benar-benar diterapkan dan menjadi warisan turun temurun.

Tercatat berdasarkan hasil Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI), kekerasan fisik pada anak memiliki prosentasi tertinggi, yaitu 72% (Utama dkk., 2020). Lebih mengagetkan, persentase pelaku kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat justru yang paling

tinggi (44%). Kekerasan pada anak merupakan isu krusial, semua anak di seluruh dunia memiliki kemungkinan untuk menghadapinya.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian beserta hasil pembahasan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa 8 poster mengandung makna denotasi, konotasi, mitos dan budaya mengenai demokrasi sebagai berikut.

Makna denotasi yang ditemukan adalah menyuarakan demokrasi melalui berbagai bentuk implementasi kegiatan yang mengandung nilai demokrasi. Kegiatan tersebut seperti pemilihan wakil dan ketua kelas, musyawarah, dan kerja bakti. Tidak hanya melalui kegiatan, penyuaran demokrasi juga dituangkan lewat konflik-konflik sosial yang ada di Indonesia, seperti perundungan, kesetaraan gender, kekerasan, dan permasalahan politik. Semua tema yang diangkat selaras dengan nilai demokrasi Pancasila.

Makna konotasi pertama yang ditemukan pada poster adalah isu atau konflik yang keberadaannya berimplikasi terhadap kesejahteraan negara, yakni seputar pentingnya berpartisipasi dalam pemilu, menghindari golput, dan pemerataan sosialisasi pemilu, serta politik dan pemerintahan yang berjalan berdasarkan asas demokrasi. Semua tanda semiotik di dalam poster saling berkesinambungan membentuk makna yang bertujuan menjaga keutuhan sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitas sebuah negara. **Makna konotasi kedua** adalah demokrasi dalam berkehidupan di masyarakat atau lingkungan sekitar. Isu atau tema yang diangkat, yakni seputar toleransi dalam bermasyarakat, contohnya kesadaran akan hak untuk berpendapat, hak untuk sehat, dan berkehidupan sosial yang aman. Gabungan tanda semiotik dalam poster membentuk makna yang bertujuan menciptakan kondisi sosial yang aman dan nyaman. Keseimbangan sosial merupakan kunci utama dalam hidup bermasyarakat. **Makna konotasi ketiga** adalah demokrasi dalam dunia pendidikan (sekolah). Poster tersebut berisi isu atau tema yang berimplikasi terhadap berjalannya sebuah pendidikan, yakni seputar sistem pendidikan yang demokratis dan toleransi. Semua tanda semiotik yang ada, menciptakan makna yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang demokratis. Sistem pendidikan yang demokratis menjadikan seluruh warganya berkembang dan memiliki potensi diri untuk merancang masa depan. **Makna konotasi keempat** adalah demokrasi dalam lingkup keluarga. Poster tersebut mengandung isu atau konflik yang berimplikasi terhadap kesejahteraan keluarga, contohnya pemahaman akan kesetaraan gender dan pola pengasuhan yang baik pada anak. Tanda semiotik pada masing-masing poster menciptakan makna yang bertujuan untuk menciptakan

lingkungan keluarag yang demokratis. Penerapan sistem keluarga yang demokratis menjadi pembelajaran demokrasi pertama bagi seseorang dalam hidupnya.

Mitos atau budaya yang muncul pada poster terbagi menjadi empat lingkup. Lingkup negara, yaitu stereotipe terhadap pemilu dan budaya atau tradisi saat pemilu. Lingkup masyarakat, yaitu stereotipe perempuan di dalam masyarakat, budaya musyawarah, gotong royong, dan kerja bakti. Lingkup sekolah, yaitu stereotipe perundungan di lingkungan pendidikan, stereotipe guru, dan kepercayaan terhadap sistem pendidikan yang belum demokratis. Lingkup keluarga, yaitu

Poster bukan sekadar karya seni yang hanya dinikmati visualisainya. Berbagai informasi krusial dapat beredar melalui poster. Poster tidak hanya berisikan kata atau klausa yang bersifat jelas, tetapi juga mengombinasikan gambar, simbol, atau ikon yang keberadaannya beralasan. Oleh karena itu, penting memahami ilmu semiotika, khususnya bagi kreator atau komunikator. Kreator poster harus pandai menentukan sasaran pembaca (*audience*) yang pas untuk posternya, begitu juga sebaliknya, poster yang dibuat juga harus relevan dengan sasaran pembaca.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, M. F. Fenomena Golput Dalam Pilkada (Studi Terhadap Rendahnya Partisipasi Pemilih Di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Dalam Pilkada Depok 2020) (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Alghifari, L. M. M., Dahlan, D., Sumardi, L., & Yuliatin, Y. (2022). Tradisi Patus Masyarakat Suku Sasak. CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 10(2), 6-11.
- Faiz, Aiman, and Imas Kurniawaty. Urgensi Pendidikan Nilai di Era Globalisasi. J. Basicedu 6.3 (2022).
- Fatmawati, N. M., & Hakim, L. Menggali Makna Kemerdekaan HUT RI Bagi Masyarakat Urban (Studi Kasus di Meteseh Tembalang). Dedikasi PKM, 4(3), 585-596.
- Gracia, J. A., Budiana, D., & Wahjudianata, M. (2021). Representasi disfungsi keluarga dalam film nanti kita cerita tentang hari ini. Jurnal e-Komunikasi, 9(2).
- Indraerawati, A., & Rahmiati, R. (2021). GOLONGAN PUTIH DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH. SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IIYAH, 2(3), 525-536.
- Ismail, Shalahudin, Suhana Suhana, and Qiqi Yuliaty Zakiah. Analisis Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter dalam Mewujudkan Pelajar Pancasila di Sekolah. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial 2.1 (2020): 76-84.
- Iswardhana, M. R., Zakinah, M., Maharani, G. A., Tayan, W. G., & Nuraini, A. (2023). Kampanye Gunakan Hak Suara dan Jangan Golput pada Pemilu 2024 Untuk Generasi Muda. PaKMAs: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 117-122.
- Mansoor, J. (2023). From Fetish to Totality: The Work of Art in the Age of Real Abstraction. Qui Parle, 32(1), 245-266.
- Moriarty, M. (1991). Roland Barthes. Stanford University Press.
- Mulyasa, H. E. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka. Bumi Aksara.
- Mustafa, M. (2021). Analisis Semiotika Poster "Ayo, Lindungi Diri dan Keluarga dari Covid 19" (Teori Ferdinand De Saussure). ORASI: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 12(2), 261-274.
- Mutiasari, H., & Yarni, L. (2023). Fenomena Bullying dalam Kalangan Siswa di SMP Negeri 1 Tara. Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan, 1(1), 72-86.
- Nasution, S. H., & Dora, N. I. (2023). Tradisi Martahi (Musyawarah) Masyarakat Desa Mandasip Suku Mandailing. JURNAL EDUKASI NONFORMAL, 4(2), 852-859.
- Nimasari, E. P., Setiawan, S., Munir, A., & Suhartono. (2024). Childhood, learning & everyday life in three Asia-Pacific cities: experiences from Melbourne, Hong Kong and Singapore: edited by I-Fang Lee, Sue Saltmarsh and Nicola Yelland, Singapore, Springer, 2023, 161pp, € 117.69 (Ebook), eISBN: 978-981-99-0486-0.
- Noviani, D. (2022). Persepsi masyarakat terhadap kesetaraan gender dalam keluarga. Journal of Innovation Research and Knowledge, 1(11), 1517-1522.
- Novianti, E., & Sos, S. (2021). Teori Komunikasi Umum dan Aplikasinya. Penerbit Andi.
- Patricia, L. (2023). Krisis Demokrasi Akibat Pengangkatan Pejabat Gubernur DKI Jakarta Tanpa Suara Rakyat. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1), 1465-1473.
- Pohan, D. D., & Fitria, U. S. (2021). Jenis Jenis Komunikasi. Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies, 29-37.
- Pradja, J. S. (2014). Filsafat Semiotika. Pustaka Setia.
- Rini, N. D. A. (2017). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN

- KEWARGANEGARAAN. Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an, 3(3).
- Ritonga, R., Hamid, A., Harahap, A. M., & Harahap, R. (2022). Penguatan Kompetensi Sosial Emosional Bagi Kepala Sekolah. SELAPARANG. Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 6(March), 309-315.
- Shalekhah, A., & Martadi, M. (2021). ANALISIS SEMIOTIKA ROLAND BARTHES PADA POSTER FILM PARASITE VERSI NEGARA INGGRIS. BARIK - Jurnal S1 Desain Komunikasi Visual, 2(1), 54-66.
- Sobri, M., & Umar, U. (2022). Implementasi Pendidikan Demokrasi di Sekolah. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 4(4), 6174-6181.
- Suharyanti, N. P. N. (2020). Aspek Hukum Golongan Putih Dalam Pemilihan Umum. Jurnal Akses, 12(2), 141-150.
- Suherman, A. (2020). Buku Ajar Teori-Teori Komunikasi. Deepublish.
- Tamara, J. (2020). Kajian Semiotika Roland Barthes pada Poster Unicef. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 3(2), 726-733.
- Wibowo, J. M., Kesek, M. A., Tumandung, K., & Aditama, M. H. R. (2022). Dampak Perilaku Sosial Mengenai Pandangan Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender. JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala, 7(4).
- Wulandari, H., & Ningsih, S. A. (2023). Penguatan Pendidikan Karakter Sejak Dini Untuk Melawan Aksi Bullying Era Revolusi 5.0. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(2), 14773–14787.
- Yulizha, A. F., Zahroh, L., Priyatno, H., Karlina, K., & Widowati, A. (2023). Peran Tri Pusat Pendidikan dalam Upaya Mengatasi Rendahnya Rasa Hormat Kepada Orang Tua dan Guru di Era Globalisasi. Jurnal Basicedu, 7(6), 3524-3534.